

# Presiden Jokowi minta pejabat jadi pelayan publik

Jumat, 5 Januari 2018 18:35 WIB

<https://www.antaraneews.com/berita/675594/presiden-jokowi-minta-pejabat-jadi-pelayan-publik>



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. (ANTARA/Sigid Kurniawan)

**"Bahkan, tadi Pak Presiden pakai istilah feodal ..."**

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pejabat pemerintah di pusat dan daerah menjadi pelayan publik membangun perekonomian bangsa.

"Satu hal lagi yang Pak Presiden pesankan benar-benar dibutuhkan sebuah perubahan paradigma atau perubahan mental dan *mindset*, perubahan mental penguasa menjadi mental pelayan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, usai mengikuti rapat terbatas tentang investasi dan perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi, menurut dia, menilai pejabat pemerintahan masih ada yang bersikap feodal.

"Bahkan, tadi Pak Presiden pakai istilah feodal, kita ini sangat feodal sekali, kita duduk dengan gagah dan megah menganggap diri kita penting, menunggu investor ke kita seolah-olah mereka butuh kita. *Kan*, padahal kita butuh dia," tutur Thomas, mengutip Presiden Jokowi.

Kepala Negara dan Pemerintahan RI, dikemukakannya, mengimbau para menteri dan kepala lembaga untuk terus mensosialisasikan perubahan sikap atau mental dari penguasa menjadi pelayan masyarakat.

Kemudian, ia menyatakan, terkait kemudahan perizinan usaha di daerah, maka pemerintah akan memperbaikinya dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 tentang *single submission* yang akan segera diterbitkan.

Selain itu, pemerintah pusat akan mempertemukan para kepala daerah dengan pimpinan kementerian/lembaga di pusat untuk membahas prioritas serta target investasi di suatu daerah.

Thomas mengatakan kunci keberhasilan pembangunan investasi dan ekonomi di daerah-daerah adalah akuntabilitas atau transparansi dalam suatu proyek investasi.

Pimpinan di daerah maupun kementerian atau lembaga akan bertanggungjawab mengenai proses dan keberhasilan suatu investasi yang masuk ke daerahnya.

"Saya kira satu hal yang sangat membantu kalau bisa kita terapkan, yaitu transparansi yang sangat terbuka kepada media dan masyarakat di mana layanan jelek, di mana proyek tidak jalan atau sebaliknya dan investasi sangat-sangat baik dan layanan-layanan sangat bagus. Saya kira itu sebuah insentif atau motivasi bagi pimpinan daerah dan pemda serta kementerian dan lembaga," ujar Thomas.

Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas mengenai investasi dan perdagangan dengan menekankan pemanfaatan momentum membaiknya situasi ekonomi dan iklim investasi Tanah Air.

Pewarta: Bayu Prasetyo

Editor: Priyambodo RH